



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202034870, 22 September 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Luthfi Auni, M. A, M. Chalis. S.Ag, M.Ag**

Alamat : Jl. Mujair No. 10 - Kuta Alam, Banda Aceh, Di Aceh, 23122

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**

Alamat : Jalan Syech Abdurrauf No. 1 Komplek UIN Ar-Raniry, Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, Banda Aceh, Di Aceh, 23111

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 September 2020, di Banda Aceh

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000204327

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Luthfi Auni, M. A	Jl. Mujair No. 10 - Kuta Alam
2	M. Chalis. S.Ag, M.Ag	Cot Mesjid, Lueng Bata
3	Khairul Halim, S.Pd.I, MA	Jl. Inong Balee No. 65. Rukoh, Kec. Syiah Kuala



No. Reg: 201080000037600

LAPORAN PENELITIAN



Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia

Ketua Peneliti

Dr. Luthfi Auni, M.A

NIDN: 2018116001

NIPN: 201811600108000

Anggota:

M. Chalis, S. Ag., M. Ag

Khairul Halim, S.Pd.I. M.A

Klaster	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T)
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : **Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia**
- b. Klaster : **Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (P3T)**
- c. No. Registrasi : **201080000037600**
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : **Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan**

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : **Dr. Luthfi Auni, M.A**
 - b. Jenis Kelamin : **Laki-laki**
 - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : **196011181988031001**
 - d. NIDN : **2018116001**
 - e. NIPN (ID Peneliti) : **201811600108000**
 - f. Pangkat/Gol. : **IV/c**
 - g. Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
 - h. Fakultas/Prodi : **Tarbiyah dan Keguruan/ Bahasa Inggris**

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : **M. Chalis, S. Ag., M. Ag**
 - Jenis Kelamin : **Laki-laki**
 - Fakultas/Prodi : **Tarbiyah dan Keguruan/ Fisika**
 - j. Anggota Peneliti 2 *(Jika Ada)*
 - Nama Lengkap : **Khairul Halim, S.Pd.I. M.A**
 - Jenis Kelamin : **Laki Laki**
 - Fakultas/Prodi : **Tarbiyah dan Keguruan/ PAI**

3. Lokasi Kegiatan : **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : **5(lima) hari**
5. Tahun Pelaksanaan : **2020**
6. Jumlah Anggaran Biaya : **Rp. 50.000.000**
7. Sumber Dana : **DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020**
8. *Output dan Outcome* : **a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI**

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 19 Oktober 2020
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Dr. Luthfi Auni, M.A
NIDN. 2018116001

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Luthfi Auni, M.A**
NIDN : 2018116001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Takengon, 18 November 1960
Alamat : Lampriet, Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Bahasa Inggris

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Dr. Luthfi Auni, M.A
NIDN. 2018116001

INTEGRASI KURIKULUM DI PERGURUAN TINGGI ISLAM "Perspektif kurikulum berbasis KKNI"

Ketua Peneliti:

Dr. Luthfi Auni, M.A

Anggota Peneliti:

M. Chalis, S. Ag., M. Ag; Khairul Halim, S.Pd.I. M.A;

Abstrak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjalan dengan pesat, seiring dengan tuntutan dan kewajiban dalam penembangan kurikulum sekarang ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia no 8 tahun 2012 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang: jenjang, penyetaraan, dan penerapan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia. Hasil penelitian diperoleh beberapa temuan antara lain bahwa Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sedang dalam proses, terbukti di beberapa perguruan tinggi agama Islam Negeri di Indonesia seperti di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah hampir semua matakuliah di setiap prodi sudah di integrasi ke kurikulum KKNI, hampir mencapai seratus persen. Berbeda dengan beberapa perguruan tinggi keislaman Negeri lainnya di Indonesia yang masih jauh tertinggal, ini menjadi masukan bagi perguruan tinggi lainnya untuk lebih terpacu dalam menjalankan kurikulum KKNI.

Kata Kunci: *Kata Kunci; Integrasi; Kurikulum (K 13); KKNI*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Tim HKI Puslitpen UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Tim Kerja Dalam Penelitian ini, sehingga sukses dalam bekerja menyuseskan penelitian ini.
8. Ucapan terimakasih kepada civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta kepada Kepala dan Staf LPM UIN

Sunan Kalijaga, Dekan serta wakil Dekan berserta staf Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

Dr. Luthfi Auni, M.A

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pola Integrasi	6
B. Kurikulum.....	10
C. Kurikulum 2013 (K13)	43
D. Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	50
E. Sejarah singkat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	67
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	76
B. Teknik Pengumpulan Data.....	78
C. Teknik Analisis Data	81
D. Anggaran Biaya	83
E. Jadwal Penelitian	84
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	85
B. Metode Penelitian	87
C. Pendekatan Penelitian	88
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang, khususnya jenjang di perguruan tinggi agar mampu bersaing di era global.

Standar pelayanan minimal disusun bersifat kebutuhan makro sehingga perlu diinterpretasikan dalam bentuk berbagai standar. Salah satu standar yang perlu diperhatikan adalah administrasi sekolah yang berkaitan langsung dengan manajemen pendidikan. Karena perkembangan pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun terus tumbuh berkembang, tentunya berdampak pada manajemen pendidikan yang semakin kompleks. Berkenaan dengan itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 8 bahwa, "*masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.*" Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak*

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa."

Tantangan paling mendesak bagi pendidikan kita adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, ditandai dengan lulusan (*output*) pendidikan dari berbagai tingkatan pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pada pendidikan tinggi yang tidak siap pakai, serta belum menunjukkan adanya pengembangan kompetensi pada diri peserta didik. Sebagaimana diungkapkan Mulyasa bahwa hambatan utama dalam pengembangan pendidikan bukan semata-mata pada aspek keuangan, tetapi bertumpu juga pada aspek manajemen (Mulyasa, 2002: 20). Oleh karena itu dalam memperbaiki mutu pendidikan harus dimulai dari perbaikan manajemen pendidikan. Sebab manajemen adalah kekuatan utama dalam organisasi untuk mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan sub-sub *system* dan menghubungkannya dengan lingkungan. Manajemen merupakan suatu proses dimana sumber-sumber yang semula tidak berhubungan satu dengan yang lainnya lalu menjadi suatu *system* menyeluruh untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Pendidikan bukan sekedar pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai luhur insani bagi kemajuan peradaban bangsa, termasuk penguatan akhlak mulia, karakter unggul, dan wawasan kebangsaan. Akan tetapi, sistem pendidikan kita kurang mampu menghadirkan pendidikan dalam

nuansa tersebut. Oleh karenanya, penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan diharapkan mampu menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan. Pengalaman membuktikan bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidaklah sesederhana dan semudah yang dibayangkan. Banyak aspek dari pendidikan yang perlu ditata ulang sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selama ini banyak orang berpendapat bahwa satu-satunya jawaban atas permasalahan mutu pendidikan tersebut adalah tersedianya dana yang memadai untuk pengembangan pendidikan, sehingga tidak jarang mahal biaya pendidikan atau sekolah menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Padahal persoalan pendidikan tidak hanya masalah finansial, lebih dari itu adalah persoalan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) juga menjadi kendala. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan selalu dilakukan oleh berbagai pihak. Namun masih terdapat beberapa kelemahan pada proses pendidikan kita, seperti rendahnya kualitas lulusan dalam hal kompetensi dan karakternya, belum meratanya pemerataan pendidikan, dan rendahnya efisiensi sekolah. Kelemahan antara lain berkaitan dengan kurangnya kemampuan pengelola pendidikan menjawab tantangan yang selalu berubah baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Berkaitan dengan ini pemerintah mengupayakan

pembaruan dan peningkatan mutu proses pendidikan, salah satu pembaharuan yang sedang dilakukan diberlakukannya kurikulum 2013, dan PP No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah cara mengintegrasikan Kurikulum 2013 (K13) ke kurikulum Berbasis KKNI dalam Pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri?
2. Apa saja kendala dalam mengintegrasikan Kurikulum 2013 (K13) ke kurikulum Berbasis KKNI dalam Pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah cara mengintegrasikan Kurikulum 2013 (K13) ke kurikulum Berbasis KKNI dalam Pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri?
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam mengintegrasikan Kurikulum 2013 (K13) ke

kurikulum Berbasis KKNI dalam Pembelajaran
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri?

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pola Integrasi

Kata Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *integration* yang artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Di dalam dunia pendidikan, integrasi mata kuliah dari terdahulu kedalam kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sangat diperlukan untuk kesempurnaan kurikulum KKNI. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi (SN- DIKT I), maka mulai tahun 2012 pengembangan kurikulum termasuk kurikulum LPTK wajib merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh setiap lulusan dengan merujuk kepada cakupan deskripsi umum dan deskripsi jenjang kualifikasi 6 dan 7. Sedangkan pembentukan sikap bagi mahasiswa calon guru dengan mengacu kepada SN- DIKT I Nomor 49 tahun 2014.

Pola integrasi dari kurikulum lama ke kurikulum yang baru yaitu kurikulum KKNI pada dasarnya sangat banyak memakan waktu agar lebih sempurna, sehingga memerlukan metode-metode baru agar menghasilkan kurikulum yang sempurna. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan/strategi, metode dan teknik pembelajaran.

Ada dua model atau pola integrasi KKNI dalam kurikulum di Perguruan Tinggi guna menyiapkan guru profesional, yaitu: (1) dengan pola yang terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, artinya level 6 dan 7 dilaksanakan secara bersamaan, atau (2) dengan pola yang berlapis, yaitu pendidikan akademik terlebih dahulu baru dilanjutkan pendidikan profesi, artinya level 6 terlebih dahulu, baru dilanjutkan pada level 7.

Deskriptor KKNI di setiap jenjang mengandung tiga capaian yang diharapkan. *Pertama* adalah ketrampilan (kognitif dan psikomotorik) yang dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan program perkuliahannya. *Kedua*, pengetahuan (*content knowledge*) yang melandasi keterampilan yang dimiliki agar mampu beradaptasi dengan perubahan di masa datang. *Ketiga*, kemampuan manajerial bagi keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai agar dapat berkembang sesuai

dengan tuntutan profesionalnya. Keberadaan Pendidikan Profesi Guru menjadi tuntutan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan bahwa guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik harus menjadi jaminan bahwa seorang guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Frase *mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional* perlu dimaknai dalam konteks arahan Pasal 1 (1), Pasal 3, dan Pasal 4 (khususnya ayat 3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Arahan pasal dan ayat yang disebutkan mengandung implikasi keterkaitan erat dengan keunikan karakteristik profesi pendidik/guru, sebagaimana dijelaskan, dan implikasi pedagogis untuk mewujudkan pembelajaran yang mendidik, yang harus didukung oleh keutuhan penguasaan kompetensi akademik dan profesional kependidikan.

Berdasarkan kerangka pikir peraturan dan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan program Pendidikan Profesional Guru memerlukan dua tahapan, yakni (1) Pendidikan Akademik Guru (berujung penganugerahan sarjana S1 kependidikan), dan (2) Pendidikan Profesi Guru (program pendidikan setelah S1 kependidikan, berujung penganugerahan sertifikat pendidik). Atas dasar itu, maka model pengembangan

kurikulum di perguruan tinggi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

Pertama, keutuhan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, yaitu penyelenggaraan pendidikan akademik guru yang kemudian diteruskan ke pendidikan profesi guru sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Profesional Guru. Keseluruhan proses penyiapan guru yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi tersebut harus merupakan suatu keutuhan sejak rekrutmen, pelaksanaan, hingga penetapan kelulusan.

Prinsip keutuhan ini penting mengingat pendidikan profesi guru yang ditegaskan dalam Permendiknas RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tidak mengatur pendidikan guru pada tingkat pendidikan akademik. *Kedua*, keterkaitan Mengajar dan Belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Dengan demikian penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan dipadukan dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap latar belakang sosial-kulturalnya. Cara guru mengenal dan merespon perilaku belajar peserta didik di kelas adalah penting karena akan membentuk hakikat lingkungan pembelajaran (*shaping the nature of the teaching and learning environment*) (Loughran, 2010)

B. Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum sering dimaknai *plan for learning* (rencana pendidikan). Sebagai rencana pendidikan kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi dan proses pendidikan (Nana Syaodih Sukmadinata. 2004 : 4). Secara historis, istilah kurikulum pertama kalinya diketahui dalam kamus *Webster (Webster Dictionary)* tahun 1856. Pada mulanya istilah kurikulum digunakan dalam dunia olah raga, yakni suatu alat yang membawa orang dari *start* sampai ke *finish*. Kemudian pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan (Ahmad Tafsir. 2004 : 53).

Secara etimologi kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani, *Curere* berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari mulai *start* sampai *finish* (Nana Sudjana, 2002 : 2) Pengertian inilah yang kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa arab, kurikulum sering disebut dengan istilah *al-manhaj*, berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya. Maka dari pengertian tersebut, kurikulum jika dikaitkan dengan pendidikan, menurut Muhaimin, maka berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta

didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai (Muhaimin, 2005 : 1).

Sedangkan dalam terminology, terdapat perbedaan pengertian kurikulum. Dalam pengertian lama kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah materi pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, yang telah tersusun secara sistematis dan logis (Oemar Hamalik, 2007 : 1). Pendefinisian ini walau terasa kurang tepat, tetapi memang banyak betulnya, jika ditarik dari asal kata kurikulum di atas tadi, yakni *curere* yang biasa diartikan dengan jarak yang harus ditempuh oleh pelari (Nana Syaodih Sukmadinata, 2004. 3).

Dalam pengertian lain, kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat *idea*, suatu cita-cita tentang manusia atau warga Negara yang akan dibentuk. Kurikulum ini lazim mengandung harapan-harapan yang sering berbunyi *muluk-muluk* (S. Nasution, 2005 : 9)

Sementara itu, Ramayulis mendefinisikan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting menentukan dalam suatu system pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada

semua jenis dan tingkat pendidikan (Ramayulis. 2005 : 9). Sedangkan menurut M. Arifin mendefinisikan kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam satu system institutional pendidikan (M. Arifin. 1996 : 183). Tampaknya dua pengertian tersebut masih terlalu sederhana dan lebih menitikberatkan pada materi pelajaran semata. Sementara itu, Zakiah Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu (Zakiah Darajat. 1996 : 122).

Dalam dunia pendidikan tidak akan terlepas dari kurikulum, Kurikulum merupakan sebuah perangkat dari mata pelajaran dan juga program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang isinya mengenai rancangan pelajaran yang akan diberikan pendidik kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum ini tidak sembarangan dibuat, namun disesuaikan pada keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan serta kebutuhan lapangan kerja.

Di dalam (UU No. 20 Tahun 2003) menyebutkan bahwa Kurikulum merupakan seperangkat rencana & sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar & cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional.

Menurut (Dr. H. Nana Sudjana Tahun 2005) Kurikulum merupakan niat & harapan yang dituangkan kedalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat & rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar. Yang terlibat didalam proses tersebut yaitu pendidik dan peserta didik. Sedangkan menurut (Harsono 2005) Mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional.

Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum ditafsirkan dalam pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli. Kurikulum dalam dunia pendidikan seperti kata Ronald C. Doll yang di kutip oleh Ali Mudlofir:

“ Kurikulum sekolah adalah muatan proses, baik formal maupun informal yang diperuntukkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan bantuan sekolah”. Sedangkan Maurice Dulton mengatakan “Kurikulum dipahami sebagai pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar di bawah naungan sekolah (Ali Mudlofir. 2012: 1-2).

Dari beberapa definisi tersebut kurikulum dapat dimaknai dalam tiga konteks, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana program belajar. Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori- teori dan praktik pendidikan. Dalam makna ini kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah, sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang menggambarkan kemampuan seseorang yang mendapatkan ijazah tersebut.

Pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar mengandung makna bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, asalkan kegiatan tersebut di bawah tanggung jawab dan monitoring dosen. Kurikulum sebagai sebuah program / rencana pembelajaran, tidaklah hanya berisi tentang program kegiatan, tetapi juga berisi tentang tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, disamping itu juga berisi tentang alat atau media yang diharapkan mampu menunjang pencapaian tujuan tersebut. Kurikulum sebagai suatu rencana disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab perguruan tinggi atau lembaga pendidikan

beserta staf pengajarnya. Jadi kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan(Dakir,2004: 3).

2. Teori Kurikulum

Dalam kamus Filsafat yang ditulis oleh Tim Penulis Rosda (1995) dijelaskan bahwa *Theory* adalah :

- a. Pemahaman akan berbagai hal dalam hubungan universal dan idealnya satu sama lain. Lawan dari praktis dan/atau eksistensi faktual.
- b. Dalam pirnsip abstrak atau umum dalam sebuah pengetahuan yang manampilkan pandangan yang jelas dan sistematik tentang sebagian dari materi pokoknya, seperti dalam teori seni atau teori atom.
- c. Sebuah teori atau model umum, abstrak, dan ideal yang digunakan untuk menjelaskan fenomena, seperti dalam teori seleksi alam. (Zainal Arifin: 2012:18-21).

Mouly dalam Beaucham (1975) menegaskan bahwa teori merupakan alat suatu disiplin ilmu yang berfungsi untuk

menentukan arah dari ilmu itu, menentukan data apa yang harus dikumpulkan, memberikan kerangka konseptual tentang cara mengelompokkan dan menghubungkan data, merangkum fakta-fakta menjadi generalisasi empiris, sistem generalisasi, menjelaskan dan memprediksi fakta-fakta, dan menunjukkan kekurangan pengetahuan kita tentang disiplin ilmu itu. Sehubungan dengan fungsi teori, Brodbeck menyatakan "*a theory not only explains and predicts, it also unifies phenomena*". Demikian halnya dengan teori kurikulum yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam pengembangan kurikulum dan menjadi syarat mutlak untuk mengembangkan kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu.

Demikian halnya dengan teori kurikulum yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam pengembangan kurikulum dan menjadi syarat mutlak untuk mengembangkan kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Menyimak definisi, karakter dan fungsi teori tersebut, berarti kurikulum mempunyai pengaruh besar terhadap implementasi dan pengembangan kurikulum. Teori kurikulum bukan hanya sebagai landasan dan acuan, tetapi juga dapat menjelaskan dan memprediksi bagaimana praktik kurikulum. Teori kurikulum mencari prinsip-prinsip atau pernyataan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya ada/terjadi dalam pendidikan.

Teori kurikulum selalu mengandung implikasi terhadap sikap dan perbuatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kurikulum selalu melibatkan aspek-aspek epistemologis (pengetahuan), ontologis (eksistensi atau realitas), dan aksiologis (nilai-nilai). Walaupun aspek-aspek tersebut sulit dipisahkan satu dengan lainnya, ahli teori kurikulum dapat menekankan pada salah satu aspek tertentu yang dianggap urgen.

Teori kurikulum dapat ditinjau dari dua fungsi pokok, yaitu : *pertama*, sebagai alat dan kegiatan intelektual untuk memahami pengalaman belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang dibantu oleh disiplin sosial ilmu lainnya. Dalam fungsi ini tidak digunakan data-data empiris. Fungsi pertama ini lebih banyak memfokuskan keunikan dan kebebasan individu serta kegiatan-kegiatan yang bersifat temporer. Implementasi kurikulum hanya sebagai upaya dan tanggung jawab moral, bukan sebagai masalah teknis. Tujuan dari teori kurikulum adalah mengembangkan, menilai dan memilih konsep-konsep tentang kurikulum sehingga dapat melahirkan gagasan-gagasan baru tentang kurikulum. *Kedua*, sebagai suatu strategi atau metode untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan berdasarkan data-data empiris. Fungsi kedua ini lebih banyak menganalisis hubungan antara teori dengan praktik.

Teori kurikulum dapat dilihat dari empat aspek penting, yaitu:

- a. Hubungan antara kurikulum dengan berbagai faktor yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kurikulum;
- b. Hubungan antara kurikulum dengan struktur kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai) yang harus dikuasai peserta didik;
- c. Hubungan antara kurikulum dengan komponen-komponen kurikulum itu sendiri, seperti tujuan, isi/materi, metode, dan evaluasi;
- d. Hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran.

John D. McNeil (1977) menegaskan teori kurikulum harus dapat menjelaskan dan memprediksi hubungan antara berbagai variabel kurikulum dengan tujuan, proses belajar, dan perencanaan program. Implikasinya, teori kurikulum harus dapat:

- a. Menjadi acuan dalam penelitian dan pengembangan kurikulum serta menjadi alat evaluasi kurikulum;
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai variabel dan hubungannya dengan komponen-komponen kurikulum yang dapat divalidasi secara empiris;
- c. Memberikan prinsip-prinsip dan hubungan-hubungan yang dapat diuji secara empiris untuk mengembangkan kurikulum; dan
- d. Menjadi kegiatan intelektual yang kreatif.

3. Konsep Kurikulum

Membicarakan masalah teori kurikulum pada hakikatnya sama dengan memusatkan pembicaraan pada apa yang dimaksud. Pernyataan ini mengandung maksud, bahwa teori kurikulum pada dasarnya bukanlah hal yang stabil keberadaannya, namun selalu berkembang mengikuti arus dua arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun demikian teori kurikulum akan sangat berguna dan memberikan arti penting bagi para praktisi, yaitu mereka yang mengelola dan menjalankan sistem pendidikan.

Seperti halnya dengan pengambilan keputusan praktis lainnya, teori kurikulum yang digunakan dalam pengambilan keputusan praktek (pelaksanaan) sistem kurikulum dan sistem pendidikan memerlukan sifat *eklektif*, yang berarti dalam mengambil keputusan praktis kurikulum maupun pendidikan harus didasarkan pada penggabungan beberapa teori kurikulum dari berbagai aliran (misalnya humanisme, subyek akademik, rekonstruksi sosial, teknologi dan sebagainya) untuk mewujudkan suatu keputusan yang sesuai dimana keputusan kurikulum itu akan diterapkan. Aspirasi semacam inilah yang biasanya digunakan oleh para praktisi (Subandijah, 1993: 6).

Teori kurikulum merupakan konsepsi yang sangat penting dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Teori kurikulum

merupakan serangkaian konsepsi yang berhubungan dengan konsep-konsep pendidikan yang berusaha menjelaskan secara sistematis, perspektif terhadap kurikulum. Beauchamp dalam (Subandijah, 1975 : 10-11) mengemukakan bahwa teori kurikulum lebih dikenakan pada hubungan antara unsur-unsur yang ada dari sekolah sehingga dapat digunakan sebagai pengarah pengembangan, penggunaan dan evaluasinya.

4. Fungsi Teori Kurikulum

Dalam kaitan ini, fungsi teori kurikulum meliputi :

- a. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan memberikan alternatif secara rinci dalam perencanaan kurikulum.
- b. Sebagai landasan sistematis dalam pengambilan keputusan, memilih, menyusun, dan membuat urutan isi kurikulum.
- c. Sebagai pedoman atau dasar bagi evaluasi formatif bagi kurikulum yang sedang berjalan.
- d. Membantu orang (yang berkepentingan dengan kurikulum) untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan sehingga merangsang untuk diadakannya penelitian lebih lanjut.

5. Klasifikasi Teori Kurikulum

Teori kurikulum dapat diklasifikasikan menurut sudut pandang para ahlinya. Seperti John D. McNeil (1990) mengklasifikasikan kurikulum atas: (1) *soft curriculum*, yaitu kurikulum yang mendasarkan pada filsafat, agama dan seni, dan (2) *hard curriculum*, yaitu kurikulum yang mendasarkan pada pendekatan rasional dan data lapangan.

Sedangkan menurut Pinar kurikulum diklasifikasikan atas teori tradisional, konseptualis-empiris, dan rekonseptualis. Teori tradisional adalah teori yang mementingkan transmisi sejumlah pengetahuan dan pengembangan kebudayaan agar fungsi masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Teori konseptualis-empiris adalah teori kurikulum yang menerapkan metode penelitian dalam sains untuk menghasilkan generalisasi yang memungkinkan pendidik untuk meramalkan dan mengendalikan apa yang terjadi di sekolah. Sedangkan teori konseptualis adalah teori yang menekankan pada pribadi, pengalaman eksistensial dan interpretasi hidup untuk melukiskan perbedaan dalam masyarakat.

6. Landasan Pengembangan Kurikulum

Landasan pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan

dipertimbangkan pada waktu mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun diluar perguruan tinggi. Landasan utama dari kurikulum yaitu landasan filosofis (*philosophical assumption*), sedangkan landasan yang lainnya yaitu hakikat ilmu pengetahuan (*epistemology*), masyarakat dan kebudayaan (*society and culuture*), individu /peserta didik (*the individual*), dan teori-teori belajar (*learning theory*). Senada dengan pendapat Robert S. Zais, Ralph W. Tyler (dalam Ornstein dan Hunkins, 1988) mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis mengacu pada pentingnya filsafat dalam melaksanakan, membina dan mengembangkan, kurikulum di sekolah. Dalam pengertian umum, filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam (Socrates) atau suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-sedalamnya. Plato menyebut filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Filsafat berupaya mengkaji berbagai masalah yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan. Menurut Mudyahardjo (1989), terdapat tiga sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya, dan pendidikan di Indonesia pada khususnya. Ketiga

system filsafat tersebut, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme.

Filsafat akan menentukan arah kemana siswa dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing kearah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan (dalam hal ini guru) akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Falsafah yang dianut oleh suatu negara bagaimanapun akan mewarnai tujuan pendidikan di negara tersebut. Dengan demikian, tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya, disesuaikan dengan falsafah yang dianut oleh negara-negara tersebut. Tujuan pendidikan pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan ini memuat pernyataan-pernyataan (statements) mengenai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa selaras dengan sistem nilai dan filsafat yang dianut.

Di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, kurikulum yang dianut sangat berorientasi kepada kepentingan politik kerajaan Belanda saat itu. Begitu pula pada saat penjajahan Jepang, kurikulum yang ada berpijak pada filsafat yang dianut negara Matahari Terbit itu. Pada masa orde baru, garapan pendidikan nasional khususnya kurikulum pendidikan disesuaikan dengan

tuntutan dan kebutuhan serta filsafat yang dianut bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

b. Landasan Psikologis

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu harus dikembangkan.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengarahkan kajian mengenai kurikulum yang dikaitkan dengan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

1) Kurikulum dan Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang terorganisasi yang berpikir tentang dirinya sebagai suatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Kurikulum sebagai program atau rancangan pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat, bukan hanya dari segi isi programnya tetapi juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Penerapan teori, prinsip, dan

hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum harus sesuai dengan kondisi masyarakat setempat sehingga hasil belajar yang dicapai siswa akan lebih bermakna dalam hidupnya.

2) Kurikulum dan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya merupakan pola kelakuan yang secara umum terdapat dalam satu masyarakat. Seluruh nilai yang telah disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam tiga hal. Pertama, ide, konsep, gagasan, nilai, norma, dan peraturan, kedua, Kegiatan dan ketiga Benda hasil karya manusia. Perguruan tinggi mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para mahasiswa dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Kurikulum pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum Dosen perlu memahami kebudayaan.

3) Ilmu Pengetahuan dan Iptek

Pengaruh iptek cukup luas, meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial,

budaya, keagamaan, keamanan, dan pendidikan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini maka kurikulum harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Berbagai Terminologi Kurikulum

Terminologi ini hanya untuk memperkaya pengetahuan kita tentang pengertian kurikulum, diantaranya adalah :

a. Core Curriculum

Core artinya inti, dalam kurikulum berarti pengalaman belajar yang harus diberikan baik yang berupa kebutuhan individu maupun kebutuhan umum. Di dalam praktek, pelaksanaan core curriculum mempunyai banyak arti dan digunakan dalam berbagai cara. Namun sementara ahli menyamakan antara *core curriculum* dengan *general education*. Memang keduanya ini memiliki penekanan obyek yang berbeda. Alpert (1953) menggunakan istilah *core curriculum* dan *general education* dalam pendidikan digunakan secara simultan yang akhirnya dia berpendapat atas kedua istilah tersebut dengan

sebutan *core program*. Dalam kaitannya dengan *core program* tersebut, Alberty mengajukan enam jenis *core program*, yaitu:

- 1) Core program terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang masing-masing dapat diajarkan secara bebas tanpa sistematika untuk mempertunjukkan hubungan masing-masing pelajaran itu.
- 2) Core program terdiri atas sejumlah pelajaran yang dihubungkan satu dengan yang lainnya.
- 3) Core program terdiri atas masalah yang luas, unit kerja, atau tema yang disatukan, yang dipilih untuk menghasilkan arti mengajar secara efektif tentang isi pelajaran tertentu, misalnya matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- 4) Core program merupakan mata pelajaran yang dilebur dan disatukan.
- 5) Core program merupakan masalah luas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik

dan sosial, masalah minat anak (peserta didik).

- 6) Core program merupakan unit kerja yang direncanakan oleh siswa (peserta didik) dan guru untuk memenuhi kebutuhan kelompok.

b. Hidden Curriculum

Sesuai dengan namanya Hidden Curriculum berarti kurikulum yang tersembunyi. Maksudnya kurikulum ini tidak direncanakan, tidak dirancang, tidak diprogram, akan tetapi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap output dari proses belajar mengajar. Kohelberg (1970), ia mengatakan bahwa Hidden Curriculum sebagai hal yang berhubungan dengan pendidikan moral dan peran guru dalam mentranformasikan standar moral. Sedangkan Robert S. Zais (1981), ia mengungkapkan berbagai terminologi dalam kurikulum, diantaranya sebagai berikut:

1) Curriculum Foundation

Artinya Pondas kurikulum. Maksudnya adalah asas-asas kurikulum mengingatkan bahwa menyusun kurikulum hendaknya memperhatikan filsafat bangsa yang dinamis, keadaan mesyarakat beserta kebudayaannya, hakikat anak dan teori belajar.

2) Curriculum Contruction

Kurikulum ini disebut juga dengan kontruksi kurikulum. Maksudnya, membahas berbagai komponen kurikulum dengan berbagai pertanyaan, misalnya seperti, apa masyarakat yang baik itu?, ke arah mana tujuan pendidikan itu?, apa hakikat manusia?, apa hidup yang baik itu?, apa ilmu pengetahuan itu?, dan lain-lainnya.

3) Curriculum Developmen

Curriculum Development atau pengembangan kurikulum membahas berbagai macam model pengembangan

kurikulum selanjutnya. Yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum adalah : siapa yang berkepentingan, guru, tenaga bukan pengajar, orang tua, atau siswa, siapa yang akan terlibat dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum, pihak karyawan, komisi-komisi yang akan dibentuk, bagaimana cara mengaturnya dan sebagainya.

4) Curriculum Imlementation

Curriculum Imlementation membicarakan sejauh mana kurikulum dilaksanakan dilapangan, dari itu perlu pantauan dan mengavaluasi kembali untuk kedepannya.

5) Curriculum Engineering.

Disebut juga pengembangan kurikulum. Beauchamp (1981) mendefenisikannya, yaitu proses yang memaksa untuk memfungsikan system

kurikulum di sekolah. Dalam system ini ada tiga fungsi, yaitu :

- i. Menghasilkan kurikulum.
- ii. Melaksanakan kurikulum.
- iii. Menilai keefektifan kurikulum dan sistemnya.

8. Macam-Macam Model Kurikulum Dan Konsep Pengembangan Kurikulum

Ada 4 aliran atau teori pendidikan yang memiliki model konsep kurikulum dan praktek pendidikan yang berbeda. Ke 4 aliran ini memiliki kareakteristik yang berbeda-beda, antara lain:

1) Kurikulum subyek akademis

Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik, yang berorientasi pada masa lalu, isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu sesuai dengan bidang disiplinnya para ahli, masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis, logis, dan solid. Model kurikulum ini adalah model yang tertua sejak

sekolah yang pertama berdiri, sampai sekarang walaupun telah berkembang tipe-tipe lain, umumnya sekolah tidak biasa melepaskan tipe ini. Karena kurikulum ini sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe lain.

Para pengembang kurikulum tidak perlu susah menyusun dan mengembangkan bahan sendiri. Mereka tinggal memilih materi ilmu yang telah dikembangkan para ahli disiplin ilmu, kemudian mengorganisasinya secara sistematis, sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan siswa yang akan mempelajarinya. Karena kurikulum ini mengutamakan pengetahuan, maka pengetahuan lebih bersifat intelektual. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subyek akademis, antara lain:

- i. Melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan sekedar mengingat-ingatnya.

ii. Studi yang bersifat integratif ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif terpadu.

iii. Pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasar mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah matematis. Pelajaran yang lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan.

Ciri - ciri Kurikulum Subyek Akademis :

- a. Berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi dan evaluasi
- b. Metode yang digunakan, ekpositori dan enquiri
- c. Organisasi isi antara lain:
- d. Correlated curriculum

- e. Unified atau Concentrated curriculum
- f. Integrated curriculum
- g. Problem Solving curriculum
- h. Evaluasi bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran.

2) Kurikulum Humanistik

Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi yaitu John Dewey (progressive education) dan J.J Rousseau (romantic education). Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana yang permisif, rilek, dan akrab. Berkat

situasi tersebut anak dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.

Pendidikan mereka lebih menekankan bagaimana mengajar siswa, bagaimana merasakan dan bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Ada beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistic yaitu pendidikan: konfluen, kritikilisme radikal, dan minikisme modern.

- i. Konfluen, menekankan keutuhan pribadi. Individu merespon secara utuh (pikiran, perasaan, tindakan) terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Kurikulum Konfluen, menyatukan segi-segi afektif dengan segi- segi kognitif.
- ii. Kritikisme Radikal, bersumber dari aliran Naturalisme / Romantisme Rousseau.

iii. Mistikisme Modern, menekankan latihan dan pengembangan kepekaan perasaan, kehalusan budi pekerti melalui sensitivity training, yoga, dan sebagainya.

3) Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan yang lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama interaksi tidak hanya terjadi pada siswa maupun dengan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswi, antara siswa dengan lingkungan sekitarnya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui kerjasama ini diharapkan siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sejak 1920-an. Hrold Rug mulai melihat dan menyadarkan kawan-

kawannya bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Ia menginginkan para siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang diperolehnya dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial.

4) Kurikulum Teknologi

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibidang pendidikan berkembang juga teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut tetapi pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang lebih besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit dan akhirnya menjadi perilaku-prilaku yang dapat diamati atau diukur. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum ada dalam dua bentuk, yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Penerapan teknologi perangkat

keras dikenal dengan teknologi alat (tools technology), sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak dikenal dengan teknologi sistem (system technology).

Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum dalam 2 bentuk yaitu :

- i. Perangkat lunak, disebut teknologi system
Pada bentuk ini pengajaran tidak membutuhkan alat dan media yang canggih, tetapi bahan ajar dan proses pembelajaran disusun secara sistem, alat dan media disesuaikan tetapi tidak terlalu dipentingkan
- ii. Perangkat keras, disebut teknologi alat

Pengajaran disusun secara sistem, dan ditunjang dengan alat dan media pembelajaran. Alat dan media belum terintegrasi dengan program pembelajaran , bersifat “ on - off “.Bentuk lain yang ditawarkan selain 2 poin diatas adalah program pengajaran telah disusun secara terpadu antara bahan dan kegiatan

pembelajaran dengan alat dan media, misal dalam bentuk kaset audio, video atau film, atau diprogramkan dalam komputer.

5) Kurikulum Berdesain Lokal

Kurikulum pembelajaran keaksaraan dalam hal ini digali dari kekayaan bahasa ibu dengan mengoptimalkan tradisi lokal. Tradisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh peserta didik dan tutor secara bertingkat, sebagai sumber bahan ajar sesuai dengan kelas keaksaraan peserta didik. Pembelajaran program ini menggunakan bahasa ibu karena dianggap memiliki kontribusi terhadap pemertahanan bahasa.

Bahan ajar yang digali dari kekayaan bahasa dan budaya, mendorong terangkatnya nilai-nilai budaya lokal yang mungkin sudah dilupakan atau tidak dikenal oleh responden. penggunaan dongeng lokal, pribahasa, musik, atau seni daerah lokal dalam proses pembelajaran keaksaraan menjadikan program ini tidak hanya berfungsi sebagai alat

pemberantasan buta aksara dan angka, tetapi berkontribusi pula pada pemertahanan bahasa dan budaya local (Tatang Somantri, 2007: 15).

Adapun sistem belajar mengajar yang dipakai pada program ini adalah sistem tematik dengan membahas trend-trend yang sedang marak di daerah tersebut, yang berkaitan dengan minat, kebutuhan, pengalaman, permasalahan dan situasi lokal serta potensi yang ada di sekitar warga. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran ini, tutor bersama warga belajar perlu merancang kegiatan pembelajaran di kelompok belajar, agar ada kesepakatan antara tutor dan warga belajar. Tidak jarang dalam pengelola di tiap kelompok belajar menggunakan alat masak agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan dengan tepat guna.

Pengembangan kurikulum pada Perguruan Tinggi mengacu KKNI dan SNPT dalam kerangka menyiapkan sosok lulusan dengan merujuk kepada standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yang bertujuan menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perwujudan kurikulum KKNI dan SNPT menghendaki

agar pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi dengan terlebih dahulu menetapkan konsep lulusan dengan mempertimbangkan konsep yang termuat dalam visi dan misi institusi. Konsep lulusan tersebut selanjutnya diwujudkan sebagai profil lulusan.

Profil lulusan ditetapkan dengan mengacu pada rumusan mutu lulusan dan relevansi. Kesemuanya itu akan dicapai melalui suatu rangkaian proses pendidikan yang bermutu, baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesi.

Ada dua kata kunci untuk mengaitkan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan kualifikasi. Pengemasan capaian pembelajaran ke dalam jenjang kualifikasi KKNI sangat penting untuk keperluan penyingkapan maupun penyeteraan kualifikasi dan atau rekognisi antara tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Selain itu, pengemasan capaian pembelajaran ke dalam KKNI juga untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara multilateral.

Pengembangan kurikulum yang mengacu pada deskriptor jenjang kualifikasi memerlukan tingkatan capaian pembelajaran yang dimulai dari tingkat universitas (*university learning outcomes*) hingga tingkat program studi (*program learning outcomes*) dan capaian pembelajaran perkuliahan (*course learning*

outcomes) yang disandingkan dengan jenjang kualifikasi. Ada perbedaan makna antara kualifikasi dan jenjang kualifikan. Menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012, kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.

Sedangkan jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja.

Kualifikasi adalah sebuah istilah yang secara internasional dipakai sebagai pencapaian penguasaan seseorang atas badan pengetahuan (*body of knowledge*) dengan keluasan dan kedalamannya yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Dengan adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata pada ijazah tetapi didasarkan pada pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan.

Selain mempertimbangkan hal di atas, pembinaan keahlian dan sikap bagi mahasiswa calon guru dilaksanakan melalui proses penerapan kurikulum di perguruan mempertimbangkan keunikan karakteristik profesi guru yaitu: (1) subyek layanan adalah manusia; (2) individu yang unik yang berkembang; (3) secara hakiki tidak berbeda dari pendidik; (4) subyek layanan yang

ang memiliki berbagai potensi; (5) keputusan- keputusan profesional dilakukan dalam situasi transaksional yang dinamis. Oleh itu, pengembangan ilmu pendidikan juga merupakan tugas program akademik dan profesi, dan karena sifat profesi guru yang unik, maka calon lulusan harus dibekali dengan teori dan praktek ,serta kemampuan meneliti.

C. Kurikulum 2013 (K13)

Kurikulum 2013 (K13) merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter (*competency and character based curriculum*) ditunjukkan untuk menjawab tantangan zaman terhadap pendidikan yakni untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif serta berkarakter. Hal ini merupakan sejumlah terobosan yang dilakukan Kemendikbud guna meningkatkan mutu pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing secara global di masa yang akan datang. Sebenarnya perubahan dari setiap kurikulum hampir sama membutuhkan penyesuaian pola pikir para pelaku pendidik (Abidin, Y. 2014).

Sama halnya dengan yang terjadi pada kurikulum 2013 ini, dapat berjalan dengan baik apabila ada perubahan paradigma atau lebih tepatnya *mindset* para pendidik atau guru dalam proses pembelajaran. Mengingat bahwa substansi perubahan dari kurikulum 2006 (KTSP) ke kurikulum 2013 ini adalah perubahan

proses pembelajaran, dari pola pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga siswa cenderung pasif, kontrol terpusat hanya pada guru menuju proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam hal ini siswa yang dituntut aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator.

Hal tersebut hanya mungkin terwujud bila *mindset* guru telah berubah. Mereka tidak lagi memiliki *mindset* bahwa mengajar harus di dalam kelas, guru yang selalu berperan aktif dalam proses pembelajaran, pembelajaran hanya satu arah dan alat pembelajaran tunggal yaitu papan tulis. Mengubah guru seperti itu tidaklah mudah, karena pola pengajaran tersebut sudah diterapkan bertahun-tahun. Mengubah *mindset* guru itulah pekerjaan rumah tersendiri bagi Kemendikbud dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013.

Kegagalan mengubah *mindset* guru akan menjadi sumber kegagalan implementasi Kurikulum 2013. Persoalannya adalah perubahan *mindset* guru tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, perlu adanya sosialisasi, penyuluhan serta pelatihan bagi guru mengenai kurikulum 2013 dalam hal ini berkenaan dengan proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Agar guru mengerti dan paham serta menerapkannya dalam pola pembelajaran di kelas. Selain itu faktor lainnya dari guru adalah banyak diantara para guru keberatan dalam mengevaluasi hasil

belajar siswa, dalam hal ini berkaitan dengan penilaian otentik. Karena disini guru di tuntutan untuk lebih mengamati siswa dalam hal penilaian, mulai dari penilaian tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/ atau produk, dan penilaian diri, penilaian antarteman dan catatan atau jurnal guru.

Gagasan dari kurikulum 2013 sangat bagus, namun proses implementasinya yang mungkin kurang tepat. Hal ini yang menyebabkan implementasi Kurikulum 2013 menemui sejumlah masalah di lapangan. Selain persoalan paradigmatik, seperti mengubah *mindset* guru tersebut, ada problem teknis lainnya yang berkaitan dengan perubahan struktur kurikulum misalnya saja pemberlakuan penambahan jam pelajaran siswa di sekolah, hal ini tentu saja menimbulkan penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya ialah dari para orang tua siswa yang risih dan kesal karena kasihan pada anaknya karena tidak punya waktu lagi untuk bermain bahkan bersosialisasi karena beban yang mereka hadapi.

Disamping itu guru pun dituntut lebih dalam proses pembelajaran, tidak kalah penting adalah bahan ajar, dalam hal ini terdapat kendala dalam mendistribusikan buku karena tidak dapat di pungkiri bahwa ada banyak sekolah yang terlambat mendapatkan buku padahal tahunan ajar telah dimulai. Maka hal inilah yang menyebabkan masih adanya guru yang menggunakan metode dan bahan ajar pada kurikulum sebelumnya meski pun

telah diadakannya pergantian kurikulum yang baru. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya dapat ditangani dengan baik misalnya dengan memfasilitasi peningkatan guru lewat pelatihan, pengadaan perpustakaan lengkap dan pendidikan tambahan agar guru dapat mengimplementasikan kurikulum baru tersebut secara baik (Hosnan, M. 2014). Selanjutnya melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah terpencil sehingga tidak akan ada lagi siswa di daerah terpencil yang terbelakang pendidikan.

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Kompetensi pada Kurikulum 2013 dirancang berikut ini.

1. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) kelas dan dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran.

2. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti adalah kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif.
3. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK.
4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi).
5. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (organizing elements) Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti.
6. Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antarmata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

7. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema (SD/MI) atau satu kelas dan satu mata pelajaran (SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK). Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut.
8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut.

Kurikulum 2013 dibuat seiring dengan kemerosotan karakter bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini. Korupsi, penyalahgunaan obat terlarang, pembunuhan, kekerasan, premanisme, dan lain-lain adalah kejadian yang menunjukkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah serta rapuhnya fondasi moral dan spiritual kehidupan bangsa (Mulyasa, 2013:14). Selain itu, penyebab perlunya mengembangkan kurikulum 2013 adalah beberapa hasil dari riset internasional yang dilakukan oleh Global Institute dan Programme for International Student Assessment (PISA) merujuk pada suatu simpulan bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang (Mulyasa, 2013: 60).

Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud adalah (Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah), sedangkan tujuan Kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Tabel 1. Perubahan pola pikir pada Kurikulum 2013

No	KBK 2004	KTSP 2006	Kurikulum 2013
1		Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan
2		Standar Isi dirumuskan berdasarkan Tujuan Mata Pelajaran (Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran) yang dirinci menjadi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran	Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran
3		Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan,
4		Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai
5		Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah	Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas)

Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 (KTSP) yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka (Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, 2013: 4).

Kurikulum 2013 mempunyai empat kompetensi inti (KI) yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut (permendikbud No. 69

Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah) :

- 1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
- 2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
- 3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
- 4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi (Mulyasa, 2013: 163). Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan kepada penguasaan kompetensi siswa, melainkan juga membentuk karakter. Sesuai dengan kompetensi inti (KI) yang telah ditentukan oleh Kemendikbud, KI 1 dan KI 2 berkaitan dengan tujuan membentuk karakter siswa sedangkan KI 3 dan KI 4 berkaitan dengan penguasaan kompetensi siswa.

D. Kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka acuan yang dijadikan ukuran dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Menurut Peraturan Presiden No. 08 tahun 2012, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KKNI merupakan program studi yang mengharuskan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi memperjelas profil lulusannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisa kebutuhan masyarakat.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sistem yang dianut oleh setiap Perguruan Tinggi haruslah berangsur diubah. Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk pengembangan inovasi terhadap suatu tuntutan tersebut. Respon terhadap perubahan kurikulum ini dapat dilihat dari banyaknya

aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perpres No. 08 tahun 2012 dan Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI, UU PT No. 12 tahun 2012 pasal 29 tentang Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI, Permenristek dan Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan yang memenuhi kriteria seperti:

1. Dalam aspek Attitude
2. Bidang kemampuan kerja
3. Pengetahuan
4. Managerial dan Tanggung Jawab

Dengan adanya target pencapaian ini, Perguruan Tinggi harus mampu menjabarkan sebuah capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil kelulusan. Untuk meningkatkan kualitas lulusan Perguruan Tinggi, ada beberapa hal yang patut dipenuhi sebagai berikut:

1. Learning Outcomes
2. Jumlah sks
3. Mata kuliah wajib
4. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
5. Akuntabilitas Asesmen
6. Waktu studi minimum
7. Perlunya Diploma Supplement

Penerapan kurikulum berbasis KKNI di Perguruan Tinggi sangatlah dibutuhkan karena dapat mengasah potensi mahasiswa untuk menjadi agen yang berwawasan luas dan memiliki skill yang memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di masyarakat. Selain itu, sistem KKNI ini lebih memudahkan pihak Perguruan Tinggi untuk menentukan tujuan akhir sebagai hasil capaian pembelajaran yang selama ini diajarkan. Dengan demikian, adanya penerapan KKNI ini menjadikan mahasiswa lebih banyak berkontribusi dalam berbagai hal.

Penerapan kurikulum berbasis KKNI ini bukanlah hanya secarik kertas yang bisa dengan mudah dihapus dan disusun ulang mengikuti format terbaru. Tetapi ia merupakan seperangkat alat pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk

mengolah masukan menjadi luaran yang memiliki nilai lebih, sehingga ada konsekuensi di dalam pemberlakuannya. Apakah kita semua bisa menjawab bahwa dengan pemberlakuan kurikulum baru maka akan meningkatkan daya serap lulusan oleh lapangan pekerjaan ? Ataukah, dapat menaikkan Indeks Prestasi Kumulatif lulusan mahasiswanya ? Ataukah, dapat memetakan posisi perguruan tinggi kita dengan rumpun ilmu sejenis ? Tentu semua pertanyaan tersebut akan sulit kita jawab, karena tidak ada patokan resmi untuk mengukurnya secara numeris. Yang ada hanyalah patokan normatif yang tertera pada butir penilaian borang akreditasi perguruan tinggi.

Tidak semua Perguruan Tinggi berhasil menerapkan kurikulum ini, dan kemudian menjadikannya sebagai acuan keberhasilan yang akan dicapai sebagai profil lulusan. Akibat pergantian kurikulum pendidikan yang terus menerus dapat mengakibatkan kebingungan bagi mahasiswa. Karena dengan ketidak konsistennya sistem akademik ini, lebih menyusahkan mahasiswa dalam belajar karena ketidak jelasan kurikulum yang ada. Jika ditilik dari setiap karakter mahasiswa, KKNI tidaklah sesuai digunakan di perguruan tinggi. Karena mahasiswa memiliki hak dan kebebasan fokus mana yang akan digelutinya walaupun tidak terpaku dengan kurikulum yang ada.

Pengembangan skill pada setiap mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, tidak hanya melalui pendidikan yang berbasis KKNI untuk menciptakan lulusan-lulusan aktif dan dapat berkontribusi di masyarakat. Kebebasan berpikir ini sebenarnya membantu mahasiswa untuk menentukan berbagai perihal terkait problematika yang ada. Terlebih terkait masalah calon-calon kontributor yang sesuai kriteria masyarakat (<https://geotimes.co.id/opini/penerapan-kurikulum-berbasis-kkni-di-perguruan-tinggi/>).

Dengan Peraturan Presiden tersebut, KKNI telah menjadi rujukan dalam penyetaraan capaian pembelajaran berbagai sektor yang ada di Indonesia. Sementara untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan KKNI di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 yang mengatur penerapan KKNI di perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan. Penerapan KKNI di perguruan tinggi selanjutnya menghasilkan program-program yang semakin memberdayakan KKNI.

KKNI diposisikan sebagai penyetara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal dan nonformal dengan kompetensi kerja yang dicapai melalui pelatihan di luar ranah Kemendiknas, pengalaman kerja atau jenjang karir di tempat kerja. Capaian pembelajaran adalah

kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Dirjen Dikti, 2010 : 17).

Parameter capaian pembelajaran tersebut seharusnya dikuasai oleh setiap lulusan dari suatu institusi pendidikan dari kurikulum yang diterapkan. Kurikulum pembelajaran yang disusun dan diterapkan oleh program studi sangat mempengaruhi kualitas capaian pembelajaran program studi tersebut. M. Rosul Asmawi menyatakan bahwa tuntutan terhadap mutu pendidikan tinggi perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk menciptakan *output* yang berkualitas dan siap terjun ke pasar kerja serta untuk memenuhi standar nasional pendidikan (M. Rosul Asmawi, 2005:71). Hasil yang dicapai dari studi ini adalah strategi meningkatkan lulusan bermutu di perguruan tinggi.

Program pengembangan kurikulum pendidikan tinggi hendaknya dapat menampung dan melayani semua sistem nilai yang ada untuk mencapai tujuan yang dapat diterima oleh semua pihak sesuai dengan peranan dan fungsi masing-masing harus benar-benar mendapat perhatian, karena otoritas dan tanggung jawab yang berbeda-beda tersebut jangan sampai mengacaukan usaha pengembangan kurikulum (Trisharsiwi, 2008:380). Lebih jauh, Moses L. Singgih & Rahmayanti menyatakan bahwa kurikulum program studi merupakan salah

satu faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan (Moses L. Singgih & Rahmayanti, 2008:133).

Adanya KKNI diharapkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia dapat menyesuaikan diri sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki *learning outcomes* yang sesuai dengan yang dibutuhkan *stake-holder* atau pengguna lulusan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tidak bertentangan dengan keberadaan PP No. 66 Tahun 2010 tentang otonomi perguruan tinggi, sehingga penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tersebut. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan guru, sangat terkait dengan KKNI. Hingga saat ini berdasarkan penelitian deskriptor KKNI tentang *learning outcomes* lulusan guru belum disusun. Sementara itu di sisi lain kualitas guru sangat menentukan pembangunan bangsa Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja, dalam rangka memberi pengakuan kompetensi kerja, sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector (Perpres No 8 tahun 2012). Penyusunan

KKNI mempunyai landasan legal yang tercakup didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Undang-Undang Nomor 30 tentang ketenakerjaan. (Dirjen Dikti,2010.7).

KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja (Dirjen Dikti, 2010:16). KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan system yang dikembangkan Negara-negara lain.

Kerangka kualifikasi disusun secara berjenjang sampai yang tertinggi berdasarkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan yang dicapai melalui pendidikan atau ketrampilan yang diperoleh melalui pelatihan. *Eropa Qualifications Framework (EQF)* sebagai salah satu kerangka kualifikasi yang dirujuk dalam pengembangan KKNI, membagi jenjang kerangka kualifikasi dalam delapan tingkat dari jenjang pertama sampai jenjang delapan yang tertinggi (Cedefop, 2010:17). *EQF* menyepadankan jenjang kualifikasi dengan jenjang pendidikan atau pelatihan, bahkan dengan gelar yang disandangnya. Konsep pembelajaran sepanjang hayat nampak kuat mendasari pengembangan *EQF*.

Pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru (Dirjen Dikti, 2010:16). Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.

KKNI menyediakan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi jenjang 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi jenjang 9 sebagai kualifikasi tertinggi (Perpres Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012). Diskriptor setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi negara secara menyeluruh, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sector-sector pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta aspek-aspek penguatan jati diri bangsa yang tercantum dalam binneka tunggal ika yaitu komponen untuk tetap mengakui keragaman agama suku budaya, Bahasa dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Berikut ini Jenjang Kualifikasi KKNI (*Perpres Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*):

JENJANG KUALIFIKASI KKNI	
JENJANG	URAIAN KUALIFIKASI
Deskripsi Umum	a.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

	<p>Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.</p> <p>Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta Deskripsi mendukung perdamaian dunia.</p> <p>Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.</p> <p>Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.</p> <p>Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.</p>
1	<p>Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.</p> <hr/> <p>Memiliki pengetahuan faktual.</p> <hr/> <p>Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.</p>
2	<p>Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.</p> <hr/> <p>Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.</p>

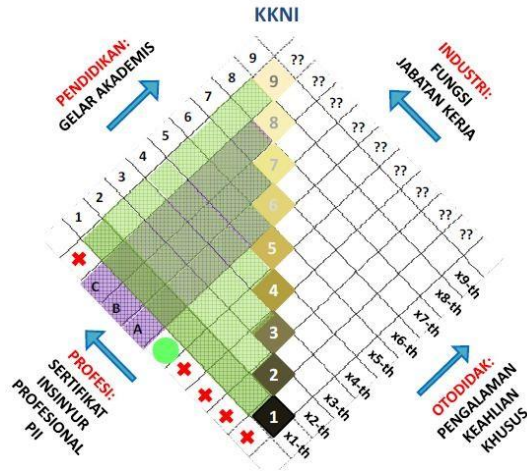
	<p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</p>
3	<p>Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.</p> <p>Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</p>
4	<p>Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</p> <p>Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.</p> <p>Mampu bekerja sama dan melakukan</p>

	<p>komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.</p> <hr/> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.</p>
5	<p>Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.</p> <hr/> <p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</p> <hr/> <p>Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.</p> <hr/> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.</p>
6	<p>Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</p> <hr/> <p>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</p> <hr/>

	<p>Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</p> <hr/> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</p>
7	<p>Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.</p> <hr/> <p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.</p> <hr/> <p>Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.</p>
8	<p>Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</p> <hr/> <p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</p>

	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	<p>Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.</p> <hr/> <p>Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.</p> <hr/> <p>Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</p>

Pencapaian setiap jenjang atau peningkatan ke jenjang yang lebih tinggi pada KKNi secara skematik dapat dilakukan melalui empat tapak jalan (*pathways*) atau kombinasi dari keempatnya. Tapak jalan tersebut seperti diilustrasikan pada Gambar 1 terdiri dari tapak jalan melalui pendidikan formal, pengembangan profesi, peningkatan karir di industri, dunia kerja atau melalui akumulasi pengalaman individual (Dirjen Dikti, 2010:17).

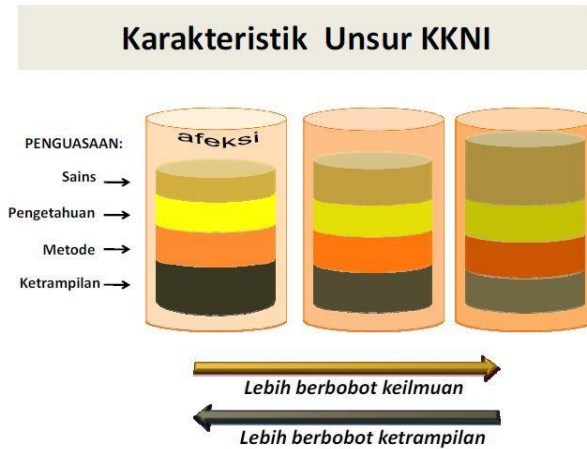


Gambar 1. Penjenjangan KKNI melalui 4 jejak jalan (pathways) serta kombinasi ke-empatnya.

Setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI secara konseptual disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial (Dirjen Dikti, 2010:18).

Keempat parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNI. Internalisasi dan akumulasi keempat parameter yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur atau melalui pengalaman kerja disebut capaian pembelajaran. Gambar 2 menunjukkan bahwa dalam setiap deskriptor KKNI untuk jenjang kualifikasi yang

sama dapat mengandung atau terdiri dari komposisi unsur-unsur keilmuan, kemampuan, keahlian dan kemampuan yang bervariasi Antara satu dengan yang lain.



Gambar 2. Kandungan KKNi yang bervariasi untuk suatu jenjang kualifikasi yang setara

Hal ini berarti pula bahwa setiap capaian pembelajaran suatu pendidikan dapat memiliki kandungan keterampilan (*skill*) yang lebih menonjol dibandingkan dengan keilmuannya, akan tetapi diberikan pengakuan penjenjangan kualifikasi yang setara.

KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem pengakuan kompetensi nasional, ini dimaksudkan sebagai pedoman sebagai berikut.

1. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;

2. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
3. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;

Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia (Dikti, 2010:9).

E. Sejarah singkat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Periode Rintisan 1951 - 1960

Periode ini dimulai dengan Penegerian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Pada Periode ini, terjadi pula peleburan PTAIN (didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950) dan ADIA (didirikan berdasarkan

Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah. pada periode ini, PTAIN berada di bawah kepemimpinan KHR Moh Adnan (1951-1959) dan Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (1959-1960).

Periode Peletakan Landasan 1960 - 1972

Periode ini ditandai dengan Peresmian IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada periode ini, terjadi pemisahan IAIN. Pertama berpusat di Yogyakarta dan kedua, berpusat di Jakarta berdasarkan Keputusan Agama Nomor 49 Tahun 1963 Tanggal 25 Februari 1963. Pada periode ini, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965. Pada periode ini telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimulai dengan pemindahan kampus lama (di Jalan Simanjuntak, yang sekarang menjadi gedung MAN 1 Yogyakarta) ke kampus baru yang jauh lebih luas (di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta). Sejumlah gedung fakultas dibangun dan di tengah-tengahnya dibangun pula sebuah masjid yang masih berdiri kokoh. Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini masih bersifat 'bebas' karena mahasiswa diberi kesempatan untuk maju ujian setelah mereka benar-benar mempersiapkan diri. Adapun materi kurikulumnya masih mengacu pada kurikulum Timur Tengah

(Universitas Al-Azhar, Mesir) yang telah dikembangkan pada masa PTAIN. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. R.H.A. Soenaryo, S.H. (1960-1972).

Periode Peletakan Landasan Akademik 1972 - 1996

Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga dipimpin secara berturut-turut oleh Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, MA (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983), Prof. Dr. HA Mu'in Umar (1983-1992) dan Prof. Dr. Simuh (1992-1996). Pada periode ini, pembangunan sarana prasarana fisik kampus meliputi pembangunan gedung Fakultas Dakwah, Perpustakaan, Program Pascasarjana, dan Rektorat dilanjutkan. Sistem pendidikan yang digunakan pada periode ini mulai bergeser dari 'sistem liberal' ke 'sistem terpimpin' dengan mengintrodusir 'sistem semester semu' dan akhirnya 'sistem kredit semester murni'. Dari segi kurikulum, IAIN Sunan Kalijaga telah mengalami penyesuaian yang radikal dengan kebutuhan nasional bangsa Indonesia. Jumlah fakultas bertambah menjadi 5 (lima); yaitu Fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dibuka pada periode ini, tepatnya pada tahun akademik 1983/1984. Program Pascasarjana ini telah diawali dengan kegiatan-kegiatan akademik dalam bentuk short courses on Islamic studies dengan nama Post Graduate Course (PGC) dan Studi Purna Sarjana (PPS) yang

diselenggarakan tanpa pemberian gelar setingkat Master. Untuk itu, pembukaan Program Pascasarjana pada dasawarsa delapan puluhan tersebut telah mengukuhkan fungsi IAIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademik tingkat tinggi setingkat di atas Program Strata Satu.

Periode Pemantapan Akademik Dan Manajemen 1996 - 2001

Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar (1997-2001). Pada periode ini, upaya peningkatan mutu akademik, khususnya mutu dosen (tenaga edukatif) dan mutu alumni, terus dilanjutkan. Para dosen dalam jumlah yang besar didorong dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, baik untuk tingkat Magister (S2) maupun Doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian pula peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga administratif dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan administrasi akademik. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan orientasi akademiknya dan mengokohkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jumlah tenaga dosen yang bergelar Doktor dan Guru Besar meningkat disertai dengan peningkatan dalam jumlah koleksi perpustakaan dan sistem layanannya.

Periode Pengembangan Kelembagaan 2001 - 2010

Periode ini dapat disebut sebagai 'Periode Transformasi', karena, pada periode ini telah terjadi peristiwa penting dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air, yaitu Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Deklarasi UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004. Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah (2001-2005) dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Drs. H. Masyhudi, BBA, M.Si. dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. H. Ismail Lubis, MA (Almarhum) yang kemudian digantikan oleh Dr. Maragustam Siregar, MA. Pada periode kedua (2006-2010) dari kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah telah dibentuk Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama. Dengan ditetapkannya keberadaan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, maka kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga pada periode kedua ini adalah sebagai berikut : Pembantu Rektor Bidang Akademik, Dr. H. Sukamta, MA, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Dr. H. Tasman Hamami, MA, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Maragustam Siregar, MA, dan Pembantu

Rektor Bidang Kerja Sama dijabat oleh Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.

Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi. Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara hadlarah an-nas, hadlarah al-ilm, dan hadlarah al-falsafah. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Pemaduan dan pengaitan kedua bidang studi yang sebelumnya dipandang secara dimatral berbeda memungkinkan lahirnya pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi rahmatan lil 'alamin.

Periode Kebersamaan Dan Kesejahteraan 2010 - 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/16522/2010 Tanggal 6 Desember 2010, Guru Besar Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam diberi tugas tambahan sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masa jabatan 2010-2014. Periode di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Musa Asy'arie dibantu oleh empat Pembantu Rektor yaitu: Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.,

Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. H. Ahmad Rifai, M.Phil., dan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

Seiring dengan perkembangan jaman dan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, dinilai organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditata kembali. Oleh karena itu, Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013. Sesuai dengan Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang baru, dalam melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh tiga Wakil Rektor yaitu: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., dan wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerja sama Dr. H. Maksudin, MA.

(<http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mempunyai Visi dan Misi dan tujuan :,

Visi :

Unggul dan Terkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

Misi :

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan :

1. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kemampuan akademis dan profesional yang integratif-interkonektif.
2. Menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
3. Menghasilkan sarjana yang menghargai dan menjiwai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan.
4. Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian yang integratif-interkonektif.
5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni. (<http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/60-Visi-misi-tujuan>)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *penelitian lapangan (field research)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu subjek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, Handari. 1995 : 72). Data yang terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu data kategorial berwujud kata, data ini akan ditafsirkan berdasarkan nilai dan bukan ditafsirkan berdasarkan perhitungan angka-angka (kuantitatif) (Muhadjir, Noeng. 2000 : 142). Dari penafsiran tersebut akan diperoleh kesimpulan yang benar dan obyektif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap proses yang sedang diteliti, berusaha memahami keadaan yang tidak diramalkan sebelumnya dan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan lebih lanjut. Sehingga segala sumber data dan dokumen terkait lainnya, dideskripsikan sesuai dengan apa adanya

dan kemudian dievaluasi serta dikaji untuk menemukan makna yang telah diperoleh.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif (deskriptif), data diperoleh berupa kategorial bukan data angka-angka, penulis menggunakan pendekatan model paradigma Naturalistik dari Egon G. Guba. Bagi paradigma *naturalistic* Guba, penelitian dilakukan dengan cara interaksi antara peneliti dengan yang diteliti, dan ada pengaruh serta hambatan timbal balik. Karena itu peneliti harus memandang yang diteliti sebagai subyek, mereka beraktivitas, segala sesuatunya *indeterminan*, dan secara bersama peneliti dan yang diteliti serta diobservasi membangun data penelitian (Muhadjir, Noeng. 2000 : 142).

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan sosial fenomenologis, karena subyek yang diobservasi bukan hanya subyek diam, melainkan secara aktif mereaksi sebagai subyek, itulah yang dikatakan oleh Guba bahwa manusia itu makhluk yang beraktivitas, aktif mereaksi. Peneliti dengan yang di observasi tidak pilah dikhotomik, melainkan menyatu dan membangun data penelitian. Mungkin peneliti tidak segera memahami makna sesuatu kejadian di lokasi penelitian yang menjadi subyek dasar dari sumber informasi dapat membantu menjelaskan, sehingga pemaknaannya dapat dikatakan disusun bersama antara peneliti dan subyek observasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Objek/Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, dengan proporsinya adalah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan aplikasi pengumpulan data kualitatif yaitu aplikasi *NVivo*, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan proses pengumpulan dan analisis data.

Adapun teknik yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik *trianggulasi*. *Trianggulasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan

sumber data yang telah ada (Sugiyono. 2011 : 241). Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *trianggulasi sumber, data dan evaluator*. Yaitu peneliti mencoba mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama serta mengevaluasi hasil penelitian dengan menggunakan evaluator yang berbeda dengan data yang sama. Melalui teknik *trianggulasi* ini, peneliti menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data untuk sumber data yang sama. Proses triangulasi ini dilakukan terus menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang digabungkan tersebut adalah:

1. Observasi (pengamatan langsung).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis *observasi partisipatif moderat* (sedang), yaitu berusaha menyeimbangkan posisi sebagai orang dalam yang mengamati dari dekat dan sebagai orang luar yang mengamati dari luar (Sugiyono. 2011 : 227). Peneliti masuk ke dalam latar, bergaul dan berbincang-bincang dengan subyek. Selain itu peneliti juga ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan di lapangan, tetapi tidak semuanya.

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur yang tetap mengacu pada permasalahan penelitian yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian informan

memperoleh kebebasan dan kesempatan mengeluarkan pikiran, pandangannya dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan subyek yang diteliti dan diarahkan sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono. 2011 : 227). Peneliti berusaha melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah para personal yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi yang diambil sebagai subjek penelitian dalam hal ini adalah Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, dosen dan mahasiswa.

2. Dokumentasi/ Menelaah dokumen.

Selain mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, penulis juga mengumpulkan data melalui data dokumen yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya telah dibukukan oleh staf tata usaha. Data yang akan dijaring melalui telaah dokumen meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Profil perguruan tinggi, Fakultas dan Program Studi;
- b. Peraturan-peraturan tertulis yang ada dan digunakan;
- c. Data tentang perencanaan, kurikulum, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pembelajaran Bahasa Inggris;
- d. Berbagai macam data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. *Focus Group Discussion* (FGD)/ Diskusi Kelompok Terfokus

Pengumpulan data dengan teknik ini adalah dengan menggunakan sebuah forum diskusi terfokus untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tema yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi peserta dalam *Focus Group Discussion* (FGD) ini adalah dosen dan mahasiswa-mahasiswa pada perguruan tinggi yang menjadi subjek penelitian serta beberapa praktisi pendidikan terkait dengan fokus penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono. 2011 : 244). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang (*cyclical*) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Dengan demikian, secara teoritis analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang guna

memecahkan masalah. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- a. Reduksi Data;
- b. Penyajian Data;
- c. Penarikan kesimpulan data/ verifikasi

1. *Reduksi data*

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana diketahui, reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. *Penyajian Data*

Setelah dilakukan proses reduksi data, analisis data kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat dipahami maknanya yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam

prosesnya penyajian data juga sama dengan reduksi data dengan arti tidak terpisah dari analisis, ia merupakan bagian dari analisis.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh peneliti selalu bersifat longgar dan terbuka, sehingga akan mempermudah untuk disempurnakan. Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data telah dilakukan seluruhnya dengan mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dalam catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan matriks-matriks yang telah dibuat untuk menemukan pola, topik atau tema sesuai dengan penelitian (Miles dan Huberman. 1992 : 16).

D. Anggaran Biaya

Anggaran biaya dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Adapun justifikasi anggaran secara keseluruhan sebagaimana terlampir pada lampiran proposal penelitian ini. *Terlampir.*

E. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan 1 tahun dengan pelaksanaan selama 10 bulan pelaksanaan, dan dapat berlanjut ke tahun berikutnya sesuai dengan hasil temuan dilapangan. Adapun jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut: *Terlampir*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang, khususnya jenjang di perguruan tinggi agar mampu bersaing di era global.

Standar pelayanan minimal disusun bersifat kebutuhan makro sehingga perlu diinterpretasikan dalam bentuk berbagai standar. Salah satu standar yang perlu diperhatikan adalah administrasi sekolah yang berkaitan langsung dengan manajemen pendidikan. Karena perkembangan pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun terus tumbuh berkembang, tentunya berdampak pada manajemen pendidikan yang semakin kompleks. Berkenaan dengan itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 8 bahwa, *“masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.”* Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak*

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa."

Tantangan paling mendesak bagi pendidikan kita adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, ditandai dengan lulusan (*output*) pendidikan dari berbagai tingkatan pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pada pendidikan tinggi yang tidak siap pakai, serta belum menunjukkan adanya pengembangan kompetensi pada diri peserta didik. Sebagaimana diungkapkan Mulyasa bahwa hambatan utama dalam pengembangan pendidikan bukan semata-mata pada aspek keuangan, tetapi bertumpu juga pada aspek manajemen (Mulyasa, 2002: 20). Oleh karena itu dalam memperbaiki mutu pendidikan harus dimulai dari perbaikan manajemen pendidikan. Sebab manajemen adalah kekuatan utama dalam organisasi untuk mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan sub-sub *system* dan menghubungkannya dengan lingkungan. Manajemen merupakan suatu proses dimana sumber-sumber yang semula tidak berhubungan satu dengan yang lainnya lalu menjadi suatu *system* menyeluruh untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Pendidikan bukan sekedar pengayaan intelektual, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai luhur insani bagi kemajuan peradaban bangsa, termasuk penguatan akhlak mulia, karakter unggul, dan wawasan kebangsaan. Akan tetapi, sistem pendidikan kita kurang mampu menghadirkan pendidikan dalam

nuansa tersebut. Oleh karenanya, penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan diharapkan mampu menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan. Pengalaman membuktikan bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidaklah sesederhana dan semudah yang dibayangkan. Banyak aspek dari pendidikan yang perlu ditata ulang sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selama ini banyak orang berpendapat bahwa satu-satunya jawaban atas permasalahan mutu pendidikan tersebut adalah tersedianya dana yang memadai untuk pengembangan pendidikan, sehingga tidak jarang mahalannya biaya pendidikan atau sekolah menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Padahal perseolan pendidikan tidak hanya masalah finansial, lebih dari itu adalah persoalan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) juga menjadi kendala.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *penelitian lapangan (field research)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu subjek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus (Nawawi, Handari. 1995 : 72). Data yang terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini adalah

penelitian deskriptif, yaitu data kategorial berwujud kata, data ini akan ditafsirkan berdasarkan nilai dan bukan ditafsirkan berdasarkan perhitungan angka-angka (kuantitatif) (Muhadjir, Noeng. 2000 : 142). Dari penafsiran tersebut akan diperoleh kesimpulan yang benar dan obyektif.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung terhadap proses yang sedang diteliti, berusaha memahami keadaan yang tidak diramalkan sebelumnya dan mengembangkan kesimpulan-kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan lebih lanjut. Sehingga segala sumber data dan dokumen terkait lainnya, dideskripsikan sesuai dengan apa adanya dan kemudian dievaluasi serta dikaji untuk menemukan makna yang telah diperoleh.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif (deskriptif), data diperoleh berupa kategorial bukan data angka-angka, penulis menggunakan pendekatan model paradigma Naturalistik dari Egon G. Guba. Bagi paradigma *naturalistic* Guba, penelitian dilakukan dengan cara interaksi antara peneliti dengan yang diteliti, dan ada pengaruh serta hambatan timbal balik. Karena itu peneliti harus memandang yang diteliti sebagai subyek, mereka beraktivitas, segala sesuatunya *indeterminan*, dan secara bersama

peneliti dan yang diteliti serta diobservasi membangun data penelitian (Muhadjir, Noeng. 2000 : 142).

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan sosial fenomenologis, karena subyek yang diobservasi bukan hanya subyek diam, melainkan secara aktif mereaksi sebagai subyek, itulah yang dikatakan oleh Guba bahwa manusia itu makhluk yang beraktivitas, aktif mereaksi. Peneliti dengan yang di observasi tidak pilah dikhotomik, melainkan menyatu dan membangun data penelitian. Mungkin peneliti tidak segera memahami makna sesuatu kejadian di lokasi penelitian yang menjadi subyek dasar dari sumber informasi dapat membantu menjelaskan, sehingga pemaknaannya dapat dikatakan disusun bersama antara peneliti dan subyek observasi.

Hasil Penelitian Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia.

Proses Pertama yaitu dengan pembuatan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan sebagai langkah perencanaan strategis, untuk menentukan arah yang direncanakan. Sutirno dan Suyadi (2016: 74), dalam analisis SWOT kegiatan yang dilakukan adalah mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan tantangan yang dihadapi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Dengan demikian program studi pada PTKIN diharapkan mampu

menyusun langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan kemampuan, kelamahan, peluang dan ancaman yang dihadapi.

Proses kedua yaitu **Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia** saat ini adalah dalam tahapan integrasi karena sedang menganut atau mengikuti kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Karena Kurikulum KKNI sudah diterapkan di perguruan tinggi islam di Indonesia, baik berupa silabus, RPS, termasuk diktat dan modul pembelajaran sehingga kedepan program studi bahasa inggris akan lebih baik karena sudah masuk dalam kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Proses ke Tiga yaitu bagaimana Proses Pola Integrasi dalam penelitian ini sedang dirubah ke kurikulum berbasis KKNI, karena beberapa mata kuliah yang belum masuk dalam kerangka KKNI sedang di integrasi ke dalam kurikulum berbasis KKNI baik itu Silabus, RPS

serta diktat dan lainnya. Beberapa evaluasi- dilakukan agar setiap mata kuliah di setiap jurusan atau prodi akan masuk dalam kerangka KKNI.

Tahapan ke Lima yaitu Dari hasil wawancara peneliti dengan responden, terdapat beberapa kendala dalam mengintegrasikan mata kuliah bagi mahasiswa angkatan yang lama, karena tidak semua bisa langsung diintegrasikan ke kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, karena kurikulum lama sudah berjalan setengah, sehingga susah untuk diintegrasikan ke KKNI, jadi salah satu cara yang diambil adalah ketika ada mata kuliah dengan memakai kurikulum lama yang tidak bisa diintegrasikan ke KKNI, maka mata kuliah tersebut tetap memakai kurikulum yang lama hingga akhir semester berjalan.

Solusi dari Kendala yang Terjadi dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Inggris

Dari temuan penelitian bahwa, Upaya yang dilakukan Prodi pada Perguruan Tinggi pada PTKIN untuk meningkatkan Mutu Pembelajaran dengan menyiapkan tenaga Pendidik serta lulusan yang berkompeten sesuai KKNI. sebagai langkah awalnya adalah merumuskan kembali visi, misi, tujuan serta profil lulusan sesuai dengan KKNI” serta “dalam menyiapkan lulusan sesuai kurikulum berbasis KKNI.

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan terakhir dalam pembahasan penelitian ini yang di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari bab-bab terdahulu. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat untuk perguruan tinggi, fakultas serta prodi bahasa inggris. Adapun kesimpulan dan saran-sarannya adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sudah berjalan dengan baik dan hampir sempurna seratus persen, hasil wawancara peneliti dengan perguruan tinggi terkait Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Dari hasil penelitian di peroleh oleh peneliti Pola Integrasi Kurikulum 2013 (K13) Terhadap Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) hampir selesai merubah kurikulum terdahulu kepada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Saran-Saran

Peneliti ingin memberikan saran kepada perguruan tinggi keislaman khususnya Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk segera menjalankan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), khususnya program studi bahasa Inggris agar sudi kiranya segera menjalankan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) seperti perguruan tinggi keislaman atau perguruan tinggi umum lainnya yang sudah menjalankan kurikulum KKNI tersebut. Karena kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka acuan yang dijadikan ukuran dalam pengakuan penjurangan pendidikan. Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) juga disebut sebagai kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Sehingga akan meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Karena kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan program studi yang mengharuskan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi memperjelas profil lulusannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisa kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Y. (2014). *Desin Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013*. Bandung: Refika Aditama.

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Alberty, *Reorganizing the High-School Curriculum by Harold Alberty. Revised edition* 1953

Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Cedefop, *Changing qualifications. A review of qualifications policies and practices* 2010

Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004

Harsono, *Kapita Skeletal Neurologi*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Gajah Mada

University Press. 2005

Hosnan, M. 2014. *Pendekatan Saintifik dan Konseptual Dalam Pembelajaran Abad 21 Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013*. Bogor: Ghalia Indonesia.

<https://geotimes.co.id/opini/penerapan-kurikulum-berbasis-kkni-di-perguruan-tinggi/>

John D. McNeil Curriculum a comprehensive introduction, 1977

John D. Neil, *Curriculum A Comprehensive Introduction* (t.tp.: a Division of Scott Foresman and Company, 1990)

Kohelberg, *The Content of Moral Education* 1970

Loughran, *Seeing knowledge for teaching teaching: Moving beyond stories. Studying Teacher Education* 2010

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohindi. Jakarta: UI Press, 1992

Mudyahardjo, Redja. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1889

Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000

M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Moses L. Singgih & Rahmayanti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan pada perguruan tinggi. *Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Bidang Teknik Industri di Yogyakarta*. November 2008

Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002

Nawawi, Handari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.1992

Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembanagn Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013

Permendiknas RI Nomor 8 Tahun 2009

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005

S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1993

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2011

Tatang Somantri, *Melek Aksara Untuk Tingkat Dasar*, Bandung: PT. IndahJaya Adipratama, 2007

Undang-Undang No 14 Tahun 2005

Undang- Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang- Undang No. 20 Tahun 2003

Zainal Arifin, *Konsep dan Pengembangan Kurikulum*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012

Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 1996